

THE EFFECT ECONOMIC GROWTH, HUMAN DEVELOPMENT INDEX (IPM) AND CAPITAL EXPENDITURE TO EMPLOYMENT IN DISTRICT OR CITY IN WEST KALIMANTAN

ILAWATI

Univeritas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study was conducted to examine and analyze the effect of economic growth, Human Development Index (HDI) and capital expenditures on the absorption of labor in districts/cities in West Kalimantan. This study uses secondary data. The internal data analysis method used in this study uses panel data regression consisting of 14 districts/cities in West Kalimantan in 2012-2016. The results of the study indicate that the variable economic growth has a negative and significant effect on the absorption of Regency/City workers in West Kalimantan. While the Human Development Index (HDI) has a positive and significant effect on the absorption of Regency/City workforce in West Kalimantan and capital expenditures have no significant effect on Regency/City employment in West Kalimantan. Simultaneously, the variables of economic growth, Human Development Index (HDI) and capital expenditures have a significant effect on the absorption of Regency/City workers in West Kalimantan.

Keywords : *Economic Growth, Human Development Index (IPM), Capital Expenditre and Employment*

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/ KOTA DI KALIMANTAN BARAT

ILAWATI

Univeritas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis data dalam yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Secara simultan, variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

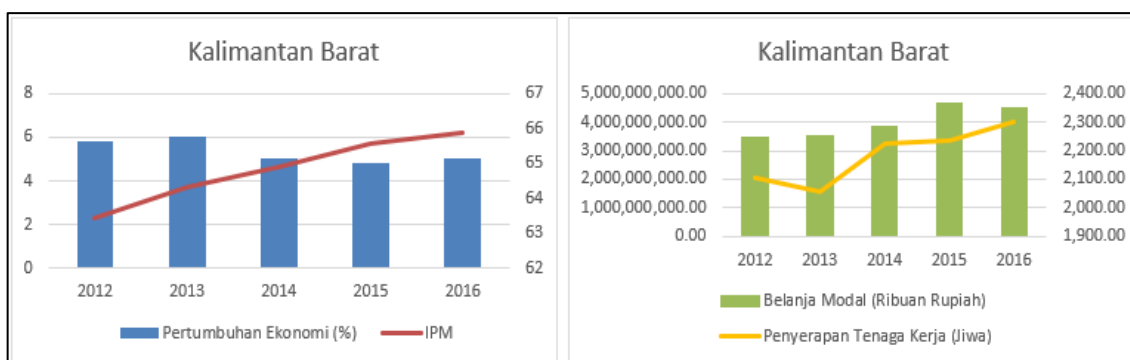
Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal dan Penyerapan Tenaga Kerja*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan sasaran menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera. Era globalisasi dan modernisasi saat ini telah membuat seluruh daerah berlomba-lomba dalam membangun daerahnya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya di seluruh daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pandangan umum (Kuncoro, 2004) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang didasarkan pada sumber daya alam mungkin tidak menguntungkan masyarakat dan pemerintahan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu strategi dan perencanaan yang tepat dan diterapkan untuk mendorong transformasi dari perekonomian. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara ialah dapat dilihat dari penyerapan dan kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi.

Peningkatan dan penurunan penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu internal maupun eksternal. Beberapa faktor-faktor yang bisa menghambat atau memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu daerah, salah satunya Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat diantaranya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal. Menurut Todaro (2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menopang kehidupan masyarakat di suatu daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dan tolak ukur secara makro di dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Penyerapan tenaga kerja merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu daerah menuju tingkat kualitas hidup masyarakat daerah tumbuh lebih baik. Tenaga kerja yang telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian akan berdampak menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Beberapa faktor-faktor yang bisa menghambat atau memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu daerah, salah satunya Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat diantaranya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan belanja modal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Belanja Modal dan Penerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

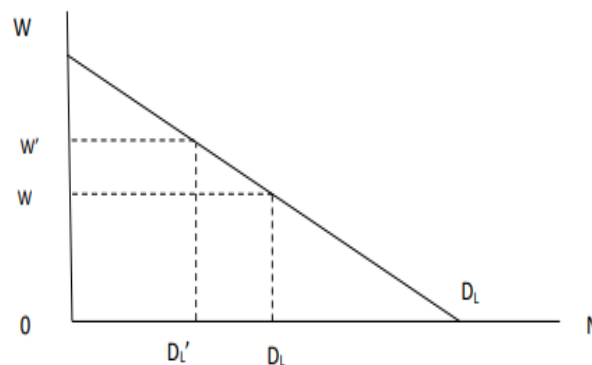
Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa umlah penduduk bekerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.300.198 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan menjadi 2.053.823 jiwa. Pada tahun 2014-2016 jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 63.41 di tahun 2012 hingga 65.88 di tahun 2016, diikuti juga dengan belanja modal daerah yang ikut meningkat dari tahun 2012 senilai Rp. 3,488,885,774.53 hingga tertinggi di tahun 2015 senilai Rp. 4,696,162,381.80. IPM dan belanja modal yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja seperti pada gambar 1.1, namun peningkatan tenaga kerja tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Berdasarkan gambar 1.1 terlihat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat terus menurun dari tingkat tertinggi 6.05% tahun 2013 terus menurun hingga 4.81% tahun 2015.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, IPM dan belanja modal. Kenaikan pertumbuhan ekonomi, IPM dan belanja modal seharusnya diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi, IPM dan belanja modal yang tinggi justru bisa menurunkan penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat. Ketiga faktor tersebut menyebabkan penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menjadi tidak stabil. Berdasarkan paparan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya, permintaan terhadap tenaga kerja muncul akibat adanya kebutuhan untuk tersedianya tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu dalam kajian ekonomi, permintaan terhadap tenaga kerja dikenal juga dengan istilah *derived demand*. Permintaan dari segi ketenagakerjaan, maka permintaan dapat diartikan sebagai hubungan antara tingkat upah atau gaji (dari sudut pandang seorang majikan merupakan harga tenaga kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh seorang majikan untuk dipekerjakan (Arfida, 2003).



Gambar 2.1. Kurva Permintaan Tenaga Kerja
Sumber: Arfida (2003)

Keterangan:

D_L = Permintaan Tenaga Kerja (*demand of labor*)

W = upah riil

N = jumlah tenaga kerja

Dari gambar 2.1 menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja, dapat dilihat bahwa hubungan antara upah dengan tenaga kerja yang diminta adalah negatif. Apabila tingkat upah (harga tenaga kerja) tinggi yaitu pada titik W' , maka permintaan akan tenaga kerja hanya sedikit yaitu hanya sebanyak D_L' , sedangkan ketika tingkat upah (harga tenaga kerja) rendah yaitu pada tingkat W , maka dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat yaitu sebanyak D_L .

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa tenaga kerja bermakna pada kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.

1) Klasifikasi tenaga kerja

Klasifikasi tenaga kerja, secara umum dapat dipilah berdasarkan penduduknya, batas kerja, dan kualitas (Pujoalwanto, 2013).

- a. Berdasarkan penduduknya: (1) Tenaga kerja, adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. (2) Bukan tenaga kerja, adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Contohnya: para pensiunan, para lansia, dan anak-anak.
- b. Berdasarkan batas kerja: (1) Angkatan kerja, adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. (2) Bukan angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kategori ini adalah anak yang sedang menempuh pendidikan dan Ibu rumah tangga.
- c. Berdasarkan kualitas: (1) Tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Kategori ini seperti dokter, pengacara, dan guru. (2) Tenaga kerja terampil, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Kategori ini seperti mekanik dan apoteker. (3) Tenaga kerja tidak terdidik, adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Kategori ini seperti pembantu rumah tangga, tenaga kerja kasar, buruh.

Penyerapan tenaga kerja merupakan bagian penting dalam proses pembangunan suatu daerah menuju tingkat kualitas hidup masyarakat darah tumbuh lebih baik. Penyerapan tenaga kerja menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau setara dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian akan berdampak menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Feriyanto (2014) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah kemampuan lapangan kerja menyerap jumlah tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja. Sedangkan Tambunan (2013) mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja ialah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.

Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak. Dapat dibilang kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Maulana (2011) mengartikan kesempatan kerja sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Kesempatan kerja dapat menjadi suatu partisipasi seseorang dalam artian memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil dari pembangunan tersebut. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, diantaranya sebagai berikut ini:

a. Kesempatan kerja permanen

Merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja, misalnya seperti seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan atau di instansi swasta yang dimana memiliki jaminan sosial hingga tua. Contohnya seperti: PNS, Polri, TNI dan lain-lain.

b. Kesempatan kerja temporer

Merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat, lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contohnya seperti: pegawai swasta yang dimana pekerjaannya tergantung pesanan, atau pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu untuk bekerja.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara. Arti pertumbuhan sendiri secara umum adalah ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Dari sini, bisa dipahami pula bahwa pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai dalam perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (BPS,2017). Pertumbuhan ekonomi berkesinambungan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung dalam jangka panjang, yang didasarkan atas tabungan, investasi, serta kegiatan swasta dan publik yang saling melengkapi (Todaro, 2011). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis (Kuncoro, 2004).

Jhingan, M. (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Menurut Todaro (2011) tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Akumulasi modal, mencangkup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja.
- b. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (*labour force*).
- c. Kemajuan teknologi, meningkatkan aplikasi pengetahuan ilmiah baru dalam bentuk temuan dan inovasi berkenaan dengan modal fisik dan modal manusia. Terdapat tiga klasifikasi dasar kemajuan teknologi yaitu:
 - (1) Kemajuan teknologi netral atau *neutral technological progress* merupakan tingkat output yang lebih tinggi tercapai dengan kuantitas atau kombinasi semua input faktor yang sama.
 - (2) Kemajuan teknologi hemat tenaga kerja atau *laborsaving technological progress* merupakan pencapaian tingkat output yang lebih tinggi dengan menggunakan kuantitas input tenaga kerja yang tidak berubah, berkat sejumlah temuan baru (seperti komputer) atau inovasi (seperti proses produksi lini perakitan).
 - (3) Kemajuan teknologi hemat modal atau *capital saving technological progress* merupakan kemajuan teknologi yang berasal dari hasil temuan baru dan inovasi yang memfasilitasi upaya pencapaian tingkat output yang lebih tinggi dengan menggunakan kuantitas input modal yang sama.

Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian (BPS, 2017). Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

- g : Pertumbuhan ekonomi (dalam persen).
 Y_t : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sekarang (dalam rupiah).
 Y_{t-1} : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya (dalam rupiah).

2.3. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menurut *Human Development Report* merupakan proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (1995) dalam BPS (2015) paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu: (1) produktivitas, masyarakat harus bisa meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. (3) kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Todaro (2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. IPM menjadi salah satu indikator dengan melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat IPM (BPS, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- c. Bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai alokator penentuan dana alokasi umum.

Sedangkan menurut Todaro (2011) manfaat IPM atau HDI yaitu:

- a. IPM/HDI digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatan rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi pula.
- b. IPM/HDI menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendapatan lebih besar dibandingkan dengan perbedaan dalam indikator pembangunan lainnya, paling tidak di bidang kesehatan dan pendidikan.
- c. IPM/HDI mengingatkan bahwa pembangunan sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan sekedar pendapatan yang lebih tinggi.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Tradisional

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* (laporan pembangunan manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai tahun 1990, adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (Todaro, 2011). IPM atau HDI berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu:

- a. Masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa—dengan bobot dua per tiga, dan rasio partisipasi sekolah bruto (*gross school enrollment ratio*)—dengan bobot satu per tiga.
- c. Standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) pendapatan.

Penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam perhitungan HDI menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Dalam IPM/HDI tradisional, IPM/HDI dihitung sebagai rata-rata hitung dari indeks pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga IPM/HDI dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HDI} = \frac{1}{3}(\text{indeks pendapatan}) + \frac{1}{3}(\text{indeks harapan hidup}) + \frac{1}{3}(\text{indeks pendidikan})$$

IPM/HDI memeringkat semua negara ke dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Pembangunan manusia rendah : 0,0 sampai 0,499.
- b. Pembangunan manusia sedang : 0,50 sampai 0,799.

- c. Pembangunan manusia tinggi : 0,80 sampai 0,90.
- d. Pembangunan manusia sangat tinggi : 0,90 sampai 1,0

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Pada bulan November 2010, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang baru (*New Human Development Index-NHDI*). Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, Indeks baru ini memiliki delapan perubahan penting (Todaro, 2011), yaitu:

- a. Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita menggantikan produk domestik bruto (GDP) per kapita.
- b. Indeks pendidikan telah diubah secara keseluruhan. Dua komponen baru telah ditambahkan, yaitu rata-rata pencapaian pendidikan aktual seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari anak-anak di masa kini.
- c. Pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen lainnya yang agak ambigu. Ukuran ini merupakan peramalan yang dilakukan PBB, bukan pencapaian.
- d. Dua komponen yang sebelumnya dipakai sebagai indikator dalam indeks pendidikan, yaitu angka melek aksara dan partisipasi sekolah, tidak digunakan lagi.
- e. Patokan tujuan atas (nilai maksimum) di setiap dimensi dinaikkan sampai pada nilai maksimum, dibanding batas angka tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
- f. Patokan tujuan bawah bagi tingkat pendapatan telah dikurangi.
- g. Perbedaan kecil lainnya adalah ketimbang menggunakan logaritma (log) umum untuk mencerminkan manfaat pendapatan marginal yang semakin menurun, HDI yang baru sekarang memakai log natural (ln).
- h. Perhitungan HDI dengan rata-rata (*mean*) geometri.

Penggunaan rata-rata geometri dalam *New Human Development Index* (NHDI) merupakan hal yang sangat penting. Ketika menggunakan rata-rata aritmatika dalam HDI (*Human Development Index*) atau dengan menambahkan semua indeks komponen dan membaginya dengan tiga, maka harus diasumsikan bahwa komponen pendapatan (pengeluaran), kesehatan, dan pendidikan ini bisa saling mensubstitusikan dengan sempurna. Sebagai contoh, nilai indeks pendidikan yang tinggi dapat mengkompensasikan nilai indeks kesehatan yang rendah. Sebaliknya, penggunaan rata-rata geometri dapat memastikan bahwa kinerja yang jelek di salah satu dimensi langsung berpengaruh terhadap indeks secara keseluruhan. Penggunaan rata-rata geometri memberikan perubahan yang bermanfaat dengan mengkondisikan bahwa ketiga dimensi atau komponen tersebut tidak dapat disubstitusikan dengan sempurna (Todaro, 2011). Sebagaimana yang dinyatakan UNDP (Todaro, 2011) perhitungan baru itu dapat “menjelaskan seberapa utuh kinerja suatu negara dalam ketiga dimensi itu”. Jadi NHDI tidak sekedar menambahkan indeks kesehatan, pendidikan, dan pendapatan serta membaginya dengan tiga, tetapi NHDI dihitung dengan rata-rata geometrik, yaitu sebagai berikut:

$$HDI = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Standar Penilaian Komponen IPM Metode Baru

No.	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
-----	--------------	----------	---------	------------

1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2.	Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	Standar UNDP
4.	Daya Beli (Rupiah PPP) yang disesuaikan (1996)	732.720	300.000	Pengeluaran Per kapita riil

Sumber: BPS (2020)

Keterangan:

- b) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
- c) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

2.4. Teori Belanja Modal

Menurut Bawono (2012) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta

perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. **Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Jhingan (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam suatu negara untuk menyediakan banyak jenis produk kepada penduduknya. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi maka tentunya hal tersebut memerlukan banyak tenaga kerja dalam proses tersebut. Oleh karena itu, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.

2.6. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan manusia akan memperlihatkan hasil dari tingkat penggunaan modal manusia yang mampu mengelola dan menyerap sumber daya yang ada. IPM memperlihatkan bagaimana kualitas modal manusia suatu daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah. IPM yang tinggi menandakan kualitas modal manusia yang dihasilkan juga tinggi. Tingginya IPM dapat berdampak pada peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Dimana IPM yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan perusahaan berusaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah tenaga kerja guna memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Hal ini pula yang membuat penyerapan tenaga kerja terjadi.

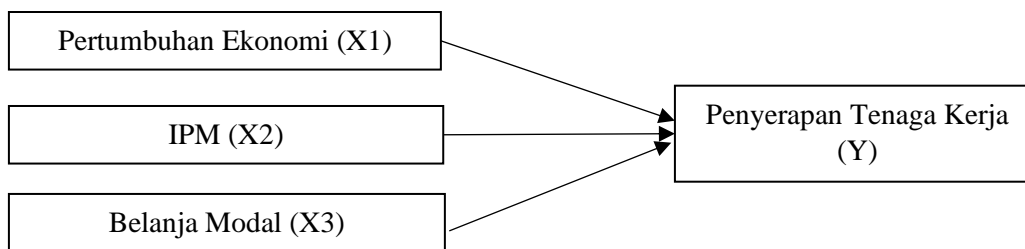
2.7. Hubungan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengeluaran negara atau pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal yang merupakan faktor yang menentukan arah pembangunan suatu daerah. Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan daerah. Tingginya belanja modal guna menunjang kegiatan perekonomian suatu daerah akan mendorong peningkatan pada sektor kegiatan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja..

2.8. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa variabel dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan belanja modal sebagai variabel independent dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependent. Sehingga dapat dibuat kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H₂: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H₃: Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan atau mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan tahunan Kalimantan Barat dalam Angka dari tahun 2012 – 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data panel dengan observasi pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2012 – 2016. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan belanja modal sebagai independen variable (X).

Data pertumbuhan ekonomi di suatu negara diperoleh dari PDB pada tahun tersebut dikurangi PDB di tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dan dikali 100%, sedangkan dalam mencari IPM didapatkan dari pengukuran pencapaian pembangunan sosio-ekonomi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Untuk belanja modal sendiri di dapatkan dari hasil jumlah realisasi belanja modal Kabupaten/Kota selama per tahun dalam nominal rupiah. Sedangkan dependent variable (Y) pada penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten/Kota pertahun dalam skala jiwa. Adapun tahapan – tahapan pengujian model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Analisis Regresi Data Panel

Dalam menentukan metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*. Sebelum menentukan model terbaik akan dilakukan pengujian untuk menentukan model *Common Effect* (OLS) atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel dengan *Chow test* dan pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dengan *Hausman test*.

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat di tuliskan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

Keterangan:

- Ln : Logaritma natural
- Y : Penyerapan Tenaga Kerja
- I : Kabupaten/Kota
- t : waktu (tahun)
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien persamaan regresi predictor (beta) X_1, X_2 dan X_3
- X_1 : Variabel Pertumbuhan Ekonomi
- X_2 : Variabel IPM
- X_3 : Variabel Belanja Modal
- ε : Error term(residual) atau kekeliruan

3.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi

3.3 Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik atau *robustness test* ini terdapat beberapa pengujian yang akan dilakukan yaitu uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Berikut penjelasan dari masing – masing uji tersebut:

- Uji Normalitas
Uji normalitas atau distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya mengikuti fungsi Gauss, dalam arti berbentuk seperti lonceng (bel), dan simetris. Uji normalitas dengan program *EViews* menggunakan uji *Jarque-Bera*. Uji *Jarque-Bera* adalah uji

statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan *skewness* dan *kurtosis* data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal.

- Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yaitu untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

- Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengetahui suatu kondisi apakah didalam model regresi tersebut terdapat korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $> 0,05$ atau 5%

3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Bawono, 2006).

3.5 Uji Simultasn (Uji $F_{\text{statistik}}$)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel- variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- Merumuskan Hipotesis (H_a)
Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5% ($\alpha=0,05$)
- Membandingkan F hitung dengan Ftabel Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / (K-1)}{(1-R) / (N-K)}$$

Dimana:

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Banyaknya koefisien regresi

N = Banyaknya Observasi

- Berdasarkan probabilitas Dengan menggunakan nilai probabilitas, H_a akan diterima jika probabilitas kurang dari 0,5

3.6 Uji Parsial (Uji $t_{\text{statistik}}$)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Winarno, 2009). Membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 diterima. Berarti bahwa variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus :

$$T_{\text{hitung}} = \frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Koefisien Regresi}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Penyerapan Tenaga Kerja(Y)	Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	IPM (X_2)	Belanja Modal (X_3)
<i>Mean</i>	156.041,9	5,488286	64,286	286.000.000
<i>Maximum</i>	269.945	7,97	77,63	1.006.492.631,24
<i>Minimum</i>	42.986	2,76	57,53	109.494.671,00
<i>Std.Dev.</i>	66.485,36	0,980732	4,184173	140.000.000
<i>Observations</i>	70	70	70	70
<i>Cross Sections</i>	14	14	14	14

Sumber: Hasil Pengolahan Uji EViews 7 (Data diolah, 2019)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 70 data observasi yang ditunjukkan pada kolom N. Data tersebut terdiri dari 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan periode 2012-2016.

- Variabel penyerapan tenaga kerja (Y) memiliki nilai minimum sebesar 42.986 jiwa dan nilai maksimum adalah sebesar 269.945 jiwa sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 156,041,9 dengan nilai penyimpangan (*standar deviation*) sebesar 66,485,36.
- Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 2,76% dan nilai maksimum sebesar 7,97% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,488286 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,980732 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel pertumbuhan ekonomi.
- Variabel IPM (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 57,53 dan nilai maksimum sebesar 77,63 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 64,286 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,184173 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel IPM.
- Variabel belanja modal (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 109.494.671,00 ribu rupiah dan nilai maksimum sebesar 1.006.492.631,24 ribu rupiah sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 286.000.000 dengan nilai standar deviasi sebesar 140.000.000 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel belanja modal.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas Test : <i>Jarque Bera</i>			
<i>Jarque-Bera</i>	1.273543	Probability	0.528998

Multikolinieritas Test			
Variable	VIF		
C	NA		
Pertumbuhan Ekonomi	1.068567		
IPM	1.576009		
Belanja Modal	1.525743		

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0,737252	Prob. F(3,66)	0,5336
Obs*R-squared	2,269740	Prob. Chi-Square(3)	0,5183
Scaled explained SS	1,368901	Prob. Chi-Square(3)	0,7128

Sumber: Hasil Pengolahan Uji EViews 7 (Data diolah, 2019)
Signifikansi pada taraf uji 5%

Berdasarkan nilai signifikan uji normalitas adalah sebesar 0,528998 atau lebih besar dari 0,05 sehingga nilai residual dalam model penelitian ini telah terdistribusi dengan normal dan dengan kata lain bahwa uji asumsi normalitas telah terpenuhi. Dari hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) pada masing-masing variabel independen menunjukkan nilai kurang dari 10 (<10). Pada variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) nilai VIF adalah sebesar 1,068567, variabel IPM (X_2) dengan nilai VIF sebesar 1,576009 dan variabel belanja modal dengan nilai VIF adalah sebesar 1,525743. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada variabel independen penelitian ini. Dan pada uji heterokedastisitas menunjukkan nilai *probability Obs*R-squared* lebih besar dari 0,05 ($0,5183 > 0,05$) maka dapat dikatakan data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 4.3 Hasil Uji Pemilihan Model

Redundant Fixed Effects Tests			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	349.655421	(13,53)	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.774297	3	0.0409

Sumber: Hasil Pengolahan Uji EViews 7 (Data diolah, 2019)
Signifikansi pada taraf uji 5%

Hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas cross section $F = 0,0000 < 0,05$. Nilai $F_{\text{statistik}} = 349.655 > f_{\text{tabel}} = 1.91$ sehingga H_0 ditolak, artinya model yang digunakan adalah *fixed effect* yang tepat digunakan daripada *common effect*. Hasil uji hausman menunjukkan nilai P Value 0,000 kurang dari 0,05 maka terima H_1 yang berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *fixed effect* daripada *random effect*.

4.4. Analisis Regresi Data Panel

4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.994797	0.484368	20.63474	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	-0.020922	0.007723	-2.709084	0.0091*
IPM	0.030425	0.007660	3.971827	0.0002*
Belanja Modal	0.000775	0.024125	0.032104	0.9745
Fixed Effects (Cross)				
Sambas	0.610427			
Bengkayang	-0.233307			
_Landak	0.186686			
Mempawah	-0.247443			
Sanggau	0.471360			
_Ketapang	0.427589			
Sintang	0.380643			
Kapuas Hulu	-0.120066			
Sekadau	-0.216516			
_Melawi	-0.314785			
Kayong Utara	-0.965299			
Kubu Raya	0.486879			
_Kota Pontianak	0.203137			
Kota Singkawang	-0.669304			
Weighted Statistics				
R-squared	0.991704	Mean dependent var	11.85091	
Adjusted R-squared	0.989200	S.D. dependent var	0.492619	
S.E. of regression	0.051195	Hannan-Quinn criter.	-2.681932	
F-statistic	395.9835	Durbin-Watson stat	2.247109	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Uji EViews 7 (Data diolah, 2019)

Signifikansi pada taraf uji 5%

Hasil uji regresi data panel ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka penyerapan tenaga kerja menurun dan begitu pula sebaliknya, sedangkan indek pembangunan manusia (IPM) dan belanja modal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya ketika IPM dan belanja modal meningkat maka penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan pula. Secara keseluruhan variabel independent dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM dan belanja modal memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependent yaitu penyerapan tenaga kerja, ditunjukkan dengan nilai prob. F-statistik $0.0000 < 0.05$ dengan besaran nilai *Adjusted R-squared* 0.989200 atau 98% yang mengindikasikan sangat kuatnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM dan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan sisanya sebesar 1,08% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain atau faktor-faktor lain di luar model seperti upah, pendapatan perkapita, kemiskinan dan sebagainya.

4.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, yang dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai korelasi bertanda negatif memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan tidak searah dengan penyerapan tenaga kerja dimana apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamar (2017) dan Alisman (2016) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Jhingan (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam suatu negara untuk menyediakan banyak jenis produk kepada penduduknya. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi maka tentunya hal tersebut memerlukan banyak tenaga kerja dalam proses tersebut. Namun, yang terjadi justru pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai serta kualitas tenaga kerja yang tidak produktif akan berdampak pada tidak terserapnya tenaga kerja dengan baik, dengan kata lain penyerapan tenaga kerja akan menurun.

Hasil penelitian ini mendukung teori permintaan tenaga kerja yang dikemukakan oleh Arfida (2003). Pada prinsipnya, permintaan terhadap tenaga kerja muncul akibat adanya kebutuhan untuk tersedianya tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu dalam kajian ekonomi, permintaan terhadap tenaga kerja dikenal juga dengan istilah *derived demand*. Permintaan dari segi ketenagakerjaan, maka permintaan dapat diartikan sebagai hubungan antara tingkat upah atau gaji (dari sudut pandang seorang majikan merupakan harga tenaga kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh seorang majikan untuk dipekerjakan. Dengan kata lain permintaan tenaga kerja atau terserapnya tenaga kerja dapat dilihat dari segi upah atau gaji yang diberikan tidak hanya memandang perekonomian yang tinggi mampu memberikan terserapnya tenaga kerja. Selain itu, teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (Hakim, 2002) menganggap bahwa inovasi dan perubahan teknologi, yang meningkatkan produktivitas kapital dan tenaga kerja, adalah faktor utama bagi proses pertumbuhan. Para peneori neoklasik mengasumsikan bahwa teknologi adalah barang publik global, sehingga semua manusia bisa menggunakan teknologi baru pada waktu yang sama. Hal ini bisa saja membuktikan bahwa penggunaan teknologi menggantikan peran tenaga kerja dalam proses produksi sehingga perusahaan lebih cenderung menggunakan teknologi untuk menekan biaya produksi sehingga hal ini menimbulkan turunnya penyerapan tenaga kerja.

Produktivitas dari tenaga kerja yang rendah mengakibatkan perusahaan menggantikannya dengan kemajuan teknologi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dan produktivitas SDM agar penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat terjadi. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM atau tenaga kerja dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini diharapkan masyarakat atau SDM tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga

membuka peluang kesempatan kerja yang secara langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Diharapkan pemerintah daerah juga memberikan atau menyediakan modal usaha untuk masyarakat agar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan melalui UMKM.

4.6. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima yang berarti bahwa IPM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hasil ini membuktikan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai korelasi bertanda positif menandakan hubungan yang searah antara IPM dan penyerapan tenaga kerja. Dimana, apabila IPM mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Begitupula, sebaliknya.

Menurut Todaro (2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan manusia akan memperlihatkan hasil dari tingkat penggunaan modal manusia yang mampu mengelola dan menyerap sumber daya yang ada. IPM memperlihatkan bagaimana kualitas modal manusia suatu daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah. IPM yang tinggi menandakan kualitas modal manusia yang dihasilkan juga tinggi. Tingginya IPM dapat berdampak pada peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Dimana IPM yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan perusahaan berusaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah tenaga kerja guna memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Hal ini pula yang membuat penyerapan tenaga kerja terjadi. IPM yang tinggi akan berdampak pada kualitas modal manusia yang meningkat. Dengan kata lain, peningkatan IPM akan mempengaruhi produktivitas modal manusia yang dihasilkan juga meningkat. Dengan produktivitas modal manusia yang tinggi maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung memperkerjakan orang-orang yang memiliki kualitas atau produktivitas yang tinggi untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan dan memperkecil resiko kerugian yang akan terjadi.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawoto (2018) yang membuktikan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan IPM mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang menurun, hal itu memerlukan tambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi guna memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, tenaga kerja yang semakin sedikit diserap oleh perusahaan akan menyebabkan pengangguran.

Pemerintah daerah didorong untuk selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya melalui IPM. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator dalam meningkatkan IPM dengan menyediakan fasilitas yang memadai serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup yang akan berdampak pada kemudahan dalam mencari pekerjaan atau membuka kesempatan kerja yang tinggi guna mendapatkan kesejahteraan atau kehidupan yang layak.

4.7. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak, yang dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai korelasi bertanda positif memiliki arti bahwa belanja modal akan berjalan searah dengan penyerapan tenaga kerja dimana apabila belanja modal mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya.

Pengeluaran negara atau pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal yang merupakan faktor yang menentukan arah pembangunan suatu daerah. Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan daerah.

Tingginya belanja modal guna menunjang kegiatan perekonomian suatu daerah akan mendorong peningkatan pada sektor kegiatan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, tingginya belanja modal juga harus dialokasikan dengan baik maka akan meningkatkan kegiatan perekonomian yang akan berdampak pada naiknya kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja akan terjadi. Belanja modal tidak hanya difokuskan untuk pembangunan daerah saja tetapi digunakan untuk membangun perekonomian atau kegiatan perekonomian daerah tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menciptakan pengangguran.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alisman (2016) yang membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah digunakan dalam proses pembangunan setiap daerah. Pengeluaran pemerintah yang tinggi tentu akan berdampak pada pembangunan daerah yang meningkat, serta perekonomian yang tercipta akan tinggi atau meningkat pula. Adanya dana dari pemerintah berupa pengeluaran pemerintah ini akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sehingga mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan mampu menyerap tenaga kerja yang berdampak terciptanya angka pengangguran yang rendah.

Tidak signifikannya belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja menandakan bahwa belanja modal yang tersedia masih rendah dan hanya digunakan untuk pembangunan daerah saja kemudian alokasi belanja modal tersebut belum menyeluruh atau terjadi penyimpangan dalam pengalokasian dana belanja modal tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengawasi penggunaan dari dana belanja modal tersebut guna menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan dana serta mengawasi alokasi dari penggunaan dana tersebut agar dapat terealisasi dengan baik dan tentunya berdampak pada pembangunan daerah serta kegiatan perekonomian di daerah tersebut.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2012 – 2016. dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas pada uji F menunjukkan hasil yang lebih kecil dari α atau dengan kata lain ini signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja akan menurun, begitu pula sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat, begitupula sebaliknya. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat belum mampu memberikan kontribusi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada daerah tersebut serta alokasi penggunaan dana ini belum begitu optimal atau baik.

Adapun implikasi atau saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah mendorong Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena memberikan dampak yang paling besar atau dominan terhadap penyerapan tenaga kerja yang terlihat dari nilai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan variabel lain. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator dalam meningkatkan IPM dengan menyediakan fasilitas yang memadai serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup yang akan berdampak pada kemudahan dalam membuka kesempatan kerja yang tinggi guna mendapatkan kehidupan yang layak. Pertumbuhan ekonomi juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah karena pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kelancaran dari kegiatan perekonomian suatu daerah. Perekonomian yang tinggi tentunya didukung dengan kualitas SDM yang memadai. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM atau tenaga kerja dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kerja sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru serta membuka peluang kesempatan kerja yang secara langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Serta Pemerintah sebaiknya mengawasi dan menilai alokasi dari penggunaan belanja modal yang digunakan dalam proses pembangunan daerah dan menunjang kegiatan perekonomian daerah guna menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan dana serta agar alokasi dari penggunaan dana tersebut agar dapat terealisasi dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat*”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, do’a dan semangat dari berbagai pihak, maka untuk itulah dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Nurul Bariyah, SE, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Muz’an Sulaiman, SE, M.M selaku Ketua PPAK Fakultas dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Hendarmin, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan dosen pembimbing akademik yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan nasehat serta bimbingan mulai dari awal rencana penelitian ini di cetuskan hingga akhir penulisan skripsi ini baik berupa ide, saran, maupun kritik.
6. Ibu Ninuk D. Ruwandari, SE, MM selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan petunjuk, bimbingan, dan bantuan hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yanto, SE, MM selaku Penguji yang banyak membantu dan memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis secara sabar selama masa perkuliahan dan yang telah memberikan dorongan moral untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Staf Administrasi Akademik dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
10. Orangtua dan saudara tercinta yang selalu berjuang memberikan kekuatan, semangat, dorongan, serta perhatian dan kasih sayang dalam memotivasi penulis, dan juga untuk keluargaku yang selama ini memberikan motivasi dan bantuan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Para sahabatku dan teman-temanku seangkatan yang selalu bersama-sama menghadapi, mendukung, dan memberi semangat dalam berbagai suka duka selama kuliah dan pengerjaan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R, Dyah, W. S, Rahmat, H. S & Martha, R. P. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alisman. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan (REP)*, 3(2) 321-332. Diakses pada <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1040/698>, 12 Maret 2019.
- Arfida, B. R. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kalimantan Barat Dalam Angka Kalimantan Barat 2012-2016*. Pontianak: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat 2014 Metode Baru*. Pontianak: BPS.
- Bawono, I. R & Mochamad, N. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta: Salemba Empat.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Hakim, A. (2002). *Ekonomi Pembangunan Edisi 1*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamar, K. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2009-2015. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 17(1) 1-10. Diakses pada <https://jurnal.uns.ac.id/jbm/article/view/11880/10446>, 12 Maret 2019.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, F. L. (2011). Kesempatan Kerja. *Online*. Diakses pada 12 Maret 2019. <http://fachrimaulana.blogspot.com/2011/02/kesempatan-kerja.html>.
- Novitasari, R. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Di Kota Semarang Tahun 2010-2014. *Publikasi Ilmiah*. Diakses pada 12 Maret 2019.
- Prawoto, D. A. (2018). Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*. Diakses pada <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7435/JURNAL%20Dini%20Andriyane%20Prawoto.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, 12 Maret 2019.
- Pujoalwanto, B. (2013). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2013). *Perekonomian Indonesia (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. & Stephen C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P. & S. C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* Jilid 2 Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.